

Kebijakan dan Komitmen Anti Penyuapan (Anti-Bribery Policy and Commitment)

Direksi PT Pupuk Indonesia (Persero) menetapkan kebijakan untuk menjalankan Perusahaan yang bersih dari praktik penyuapan dengan menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).

Guna mendukung kebijakan tersebut, Direksi berkomitmen untuk:

- 1 Menetapkan sasaran SMAP.
- 2 Menetapkan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan.
- 3 Mematuhi setiap peraturan perundang-undangan anti penyuapan yang berlaku.
- 4 Mengkomunikasikan Kebijakan Anti Penyuapan kepada Pihak Berkepentingan.
- 5 Memastikan ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, dan dukungan teknologi informasi.
- 6 Memastikan setiap unit kerja melakukan penilaian dan pengendalian risiko penyuapan.
- 7 Mendorong setiap pimpinan unit kerja untuk mencegah dan mendeteksi penyuapan yang terjadi di unit kerjanya.
- 8 Mempromosikan budaya anti penyuapan.
- 9 Menyediakan sistem pelaporan indikasi penyuapan.
- 10 Memastikan terlaksananya Audit Internal atas penerapan SMAP.
- 11 Mereviu efektivitas penerapan SMAP secara periodik guna peningkatan berkelanjutan.
- 12 Memastikan bahwa strategi dan Kebijakan Anti Penyuapan Perusahaan telah sejalan.

The Board of Directors of PT Pupuk Indonesia (Persero) has formulated a policy to run a clean company from bribery practices by implementing the Anti-Bribery Management System (ABMS).

To support this policy, the Board of Directors is committed to:

- 1 *Setting the ABMS goals.*
- 2 *Defining the duties, responsibilities, and authorities of the Anti-Bribery Compliance Function.*
- 3 *Complying with prevailing anti-bribery laws and regulations.*
- 4 *Communicating the anti-bribery policy to the Stakeholders.*
- 5 *Ensuring the availability of human resources, budget, and information technology support.*
- 6 *Ensuring that each business unit assesses and controls bribery risks.*
- 7 *Encouraging every head of business unit to prevent and detect bribery that occurs in his/her business unit.*
- 8 *Promoting anti-bribery culture.*
- 9 *Providing a bribery indication reporting system.*
- 10 *Ensuring the implementation of Internal Audit on the implementation of ABMS.*
- 11 *Periodically reviewing the effectiveness of ABMS implementation for continuous improvement.*
- 12 *Ensuring that the Company's anti-bribery strategy and policies are in line.*

Jakarta, 18 Januari 2022